

DAFTAR PUSTAKA

- A.A. Oka Mahendra, 2005. *Pilkada di Tengah Konflik Horizontal: Nurmahmudi Ismail Unggul di KPUD, Badul Kamal Menang di Pengadilan Tinggi*, Millenium Publisher, Jakarta.
- A.W.Bradley and K.D.Ewing, *Constitutional and Administrative Law Part IV: Administrative Law*, (London and NewYork: Longman)
- Abdu Kadir Muhammad, 2004. *Hukum dan penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Abdullah, Rozali, 2005. *Manajemen Pemilihan Kepala Daerah Langsung dalam Pengembangan Demokrasi Lokal*. Seminar Pilkada Langsung Wahana Bina Praja IPDN. Jakarta.
- Ahmad Fadlil Sumadi, 2009. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, IAIN Walisongo Semarang, Semarang.
- Ahmadi. 1999. *Psikologi Sosial*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 1989. Departemen Agama RI, Gema Risalah Press, Bandung.
- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek (Edisi Revisi V)*. Rineka Cipta, Jakarta.
- Bagir Manan. 2004. *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, FH UII Press, Cet. Ke-3, Yogyakarta.
- Brannen, Julia. 2005. *Memadu Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Candra, Dedi. 2004. *Studi Futuristik Tentang Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Secara Langsung Menurut Persepsi Masyarakat di Kabupaten Merangin Provinsi Jambi*. Program Pasca Sarjana MAPD, Jatinangor.
- Cecep Effendi, *Evaluasi Kritis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung, Makalah*, (tidak diterbitkan, tanpa tahun).
- Cecep Effendi, 2005. *Evaluasi Kritis Pelaksanaan Pilkada secara langsung*, Jurnal Legislasi Indonesia,
- Djohan, Djohermansyah dan Made Suwandi. 2005. *Pilkada Langsung : Pemikiran dan Peraturan*. IIP Press. Jakarta.

- Hamid Awaludin, *peraturan pemerintah (PP) dalam pemilihan kepala daerah langsung*, sebagaimana dikutip dari <<http://www.apkasi.or.id>>, 24 Maret 2006.
- Handbook on Election Result Dispute Settlement Constitutional Court of the Republic of Indonesia* available at http://aceproject.org/eroen/regions/asia/ID/Handbook_Election_Result_Dispute_Settlement.pdf/view,
- Ibn Khaldun, Muqaddimah Ibn Khaldun, Ahmadie Thoha, Terj. *Muqaddimah Ibn Khaldun*, Pustaka Firdaus, Jakarta, 1986.
- Imam An-Nawawi, 2011. *Syarah Shahih Muslim*, Jilid 12, Amir Hamzah, Terj. *Syarah Shahih Muslim*, Pustaka Azzam, Jakarta,
- Janedjri M. Gaffar (et.al) dkk, 2010. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia,
- Jim Schiller, 2009 *Demokrasi di tingkat lokal*, IIP Press, Jakarta.
- Jimly Assiddiqie, 2007. *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, Buana Ilmu Populer Kelompok Gramedia, Jakarta.
- Juri Ardiantoro, 2006. *Potensi Konflik Pilkada dan Antisipasinya* dalam Makalah, Tak Diterbitkan, 2006).
- Kaloh,J. 2003. *Kepala Daerah*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- KPU Kabupaten Tegal, *Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2013*.
- Labolo, Muhadam. 2004. *Pemilihan Kepala Daerah Langsung Prospek dan Tantangan dalam Masa Transisi di Indonesia*. Makalah Lembaga Pengkajian Strategik Pemerintahan IIP. Jakarta
- Maruarar Siahaan, 2011. *Hukum Acara MKRI*, Sinar Grafika, Jakarta,
- Moh. Mahfud MD, 1999. *Hukum dan Pilar-pilar Demokrasi*, Gama Media, Yogyakarta,
- Moh. Mahfud MD, 2007. *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, Jakarta: LP3ES,
- Moleong, Lexy. 2004. *Metode Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosda Karya. Bandung.
- Muhadam Labolo, 2004. *Pemilihan Kepala Daerah Langsung, Prospek dan Tantangan dalam Masa Transisi di Indonesia*, UI Press, Jakarta.
- Nazir, Moh. 1998. *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia. Jakarta.

- Paparan Dirjen Otda. *Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah*
- Prihatmoko, Joko J. 2005. *Pemilihan Kepala Daerah Langsung*.Pustaka Pelajar.Yogyakarta.
- Ramlan Surbakti, 2005. *Beberapa Pertanyaan tentang Sistem Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*, dalam *Jurnal Pamong Praja*, Edisi 3-
- Riduwan. 2004. *Statistika Untuk Lembaga Dan Instansi Pemerintahan Atau Swasta*. Alfabeta.Bandung.
- Rozali Abdullah, 2005. *Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.,
- Soekanto, 1984. *Pengantar Penelitian hukum*, Cetakan etiga, UI Press, Jakarta,
- Sugiono, 2008. *Statistik untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiono, 2008, *Statistik untuk Penelitian*, Bandung, Alfabeta,
- Sugiyono. 2003. *Metode Penelitian Administrasi*.Alfabeta. Bandung.
- Suharizal, S.H., M.H, 2010. *Pemilukada Regulasi*, Gema Cipta,Jakarta,
- Supandi, 2005. *Kepatuhan Pejabat Tata Usaha Negara dalam Melaksanakan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara di Medan*, Disertasi Ilmu Hukum, (Medan: Universitas Sumatera Utara)
- Taufiqurrahman Sahuri, 2005. *Anatomi Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Makalah, Seminar Putusan Mahkamah Konstitusi Pengujian Undang-Undang Nomor 32 tentang Pemerintahan Daerah, Kerjasama Puslitka MK, Hans Seidel Foundation, dan PS-HTN FH-UI, Jakarta, 28 Maret 2005
- Titik Triwulan Tutik, 2005. *Pemilihan Kepala Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Dalam Sistem Pemilu Menurut Undang-Undang Dasar 1945*, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta,
- Wasistiono, *Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung Menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Dan Dampaknya Secara Politis, Hukum, Pemerintahan Serta Sosial Ekonomi*. Bahan Diskusi Panel PPMP dan Alumni Universitas Satyagama
- Wasistiono,Sadu. 2005. *Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung Menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Dan Dampaknya Secara Politis, Hukum, Pemerintahan Serta Sosial Ekonomi*. Bahan Diskusi Panel PPMP dan Alumni Universitas Satyagama.

Yahya Ismail, *Manhaj as-Sunnah fi al-‘Alaqah bain al-Hakim wa al-Mahkum*, Andi Suherman, Terj. 1995. *Hubungan Penguasa dan Rakyat Dalam Perspektif Sunnah*, Gema Insani Press, Jakarta,

Yusdianto, *Identifikasi Potensi Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah (Pemilukada) dan Mekanisme Penyelesaiannya*. Jurnal Konstitusi Vol II nomor 2, November 2010.

Zain Badjeber, 2005. *Komentar Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah*, Forum Indonesia Baru, Jakarta,

Undang-Undang, Peraturan-Peraturan:

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu Tahun 2004

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 120-81 Tentang Pedoman Fasilitas Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Pasal 236 C UU No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang disahkan tanggal 28 April 2008 dan diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59

Pasal 34 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang *Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi*, Pasal 5 ayat (3) PMK 04/PMK/2004.

Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang *Pemerintahan Daerah*

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2005 Tentang Pedoman Bagi Pemerintah daerah Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Putusan Mahkamah Konstitusi atas Perkara Nomor 072-073/PUU-II/2004 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Terhadap UUD 1945

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-III/2005, hlm. 112-113

Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah*, PP No. 6, LN No. 22 Tahun 2005, TLN No. 4480, Pasal 4 ayat (1) dan (2).

Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah, UU No. 32, LN 125 Tahun 2004, TLN No. 4437, Pasal 57 menyatakan: "Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah diselenggarakan oleh KPUD

Undang-Undang tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, UU No. 12, LN 37 Tahun 2003, TLN No. 4277

Undang-Undang tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, UU No. 23, LN 93 Tahun 2003, TLN No. 4311

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 28 ayat (1).

Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah, UU No. 32, LN 125 Tahun 2004, TLN No. 4437

Website:

Cetro, *Kesimpulan Pemohon Perkara Nomor 072/PUU-II/2004 Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 terhadap Undang-Undang Dasar 1945*", dikutip dari <<http://www.cetro.or.id>>, 23 Agustus 2015.

Cetro, *Urgensi Revisi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Sebelum Penyelenggaraan Pilkada*, dikutip dari <http://www.cetro.or.id>, 23 Agustus 2015

Democracy in Brief, Bureau of Information Program US Departments of State, <http://usinfo.state.gov>., hlm.1

Hasil penghitungan suara yang diperoleh masing-masing calon kepala daerah menimbulkan kontroversi. (di akses dalam [Http: Okzone.com](http://Okzone.com) tanggal 11 Agustus 2015)

<http://www.freedomhouse.org/template.cfm?page=35&year=2006>, diakses 30 Agustus 2015

<http://www.presidenri.go.id/index.php/fokus/2008/02/19/2776.html>, diakses pada tanggal 30 Agustus 2015

Israr Iskandar, *Potensi Konflik dalam Pilkada Langsung*, Suara Karya, Kamis, 10 Maret 2005.

Juri Ardiantoro, 2006. *Konflik Pilkada dan Netralitas KPUD* dalam Harian INDOPOS, 17 Mei 2006.

Susie Berindra, *Upaya Mencari Pemimpin Ideal*, <[http:// kompas.com/kompas-cetak/0604/28/politikhukum/2630087.htm](http://kompas.com/kompas-cetak/0604/28/politikhukum/2630087.htm)>, 06 Mei 2006.